

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sektor perbankan mempunyai peran yang penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Friedman menyatakan bahwa kegagalan pemerintah dalam menyediakan *framework* kebijakan moneter yang stabil merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya krisis dan kegagalan makroekonomi negara. (Collins & Broten, 2017) menyatakan pada penelitiannya bahwa teori *monetarism* Friedman mendasarkan kemajuan perekonomian negara pada kestabilan kebijakan moneter. (Putri & Akmalia, 2016) Dari data Bank Indonesia menjelaskan bahwa sektor perbankan merangkup sekitar 79% dari total aset yang ada pada industri keuangan negara. Kegagalan dan kemunduran pada sistem perbankan akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Perbankan Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat ditinjau secara terpisah dengan kondisi makro ekonomi.

Dengan menggunakan data dan indikator perbankan, para ekonom dapat meninjau kondisi perekonomian suatu negara dengan cukup akurat. indikator pertumbuhan kredit merupakan salah satu tolak ukur utama akan keadaan dan proyeksi bagaimana keadaan pertumbuhan ekonomi, Friedman menyatakan bahwa otoritas kebijakan moneter harus dapat memastikan aktivitas penyaluran uang selalu dalam kondisi yang stabil, dan dari strategi tersebut merupakan akar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit dapat menggambarkan kondisi perekonomian yang lebih riil dan lebih utama (Rustia, 2012) menyatakan pada penelitiannya bahwa mengukur kemajuan perekonomian negara tidaklah cukup dengan hanya menggunakan angka PDB saja, dikarenakan data tersebut tidak menggambarkan bagaimana performa negara dalam mendistribusikan modal dan mengendalikan hutangnya. (Alkhazaleh, 2017) menjelaskan bahwa jasa penyaluran kredit yang efisien dan terkendali tidak hanya akan bermanfaat bagi individu, tetapi akan bermanfaat juga ke bisnis, organisasi, pemerintah dan yang

terpenting adalah perekonomian negara. Oleh karena itu pentingnya kebijakan yang tepat dalam menjaga *flow* dari penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan utama bagi para otoritas kebijakan moneter dan makroekonomi.

Krisis keuangan global bermula di AS pada pertengahan 2007, yang disebabkan oleh gagalnya sistem pembayaran *subprime mortgage* atau kredit rumah, menyebabkan jatuhnya beberapa keuangan institusi bank menghadapi kesulitan menyalurkan kredit yang menyebabkan kebangkrutan dan penutupan. Dari krisis tersebut menyebabkan *domino effect* pada sektor perbankan yang dimulai pada 2008 di bank-bank di Asia dan tidak terlepas dari krisis tersebut adalah Indonesia. Krisis *mortgage* di Amerika menyebabkan kondisi perekonomian yang tidak stabil memasuki tahun 2009. Krisis tersebut juga berdampak langsung pada tahun 2009 menyebabkan investasi Indonesia yang berada di Amerika Serikat mengalami kemunduran yang besar, dari krisis tersebut juga memberikan dampak tidak langsung/*indirect* pada turunnya Inflasi, dan *Non performing Loans* yang juga berada pada angka tertinggi selama 10 tahun terakhir yaitu pada angka 3,31%. kasus tersebut dikaitkan praktek manajemen kredit yang buruk yang menyebabkan meningkatkan minat dalam mempelajari masalah manajemen penyaluran kredit yang efisien dan beresiko rendah.

TABEL 1. TINGKAT PENYALURAN KREDIT BANK UMUM, PERTUMBUHAN KREDIT, INFLASI, BI RATE, GWM, NPL.

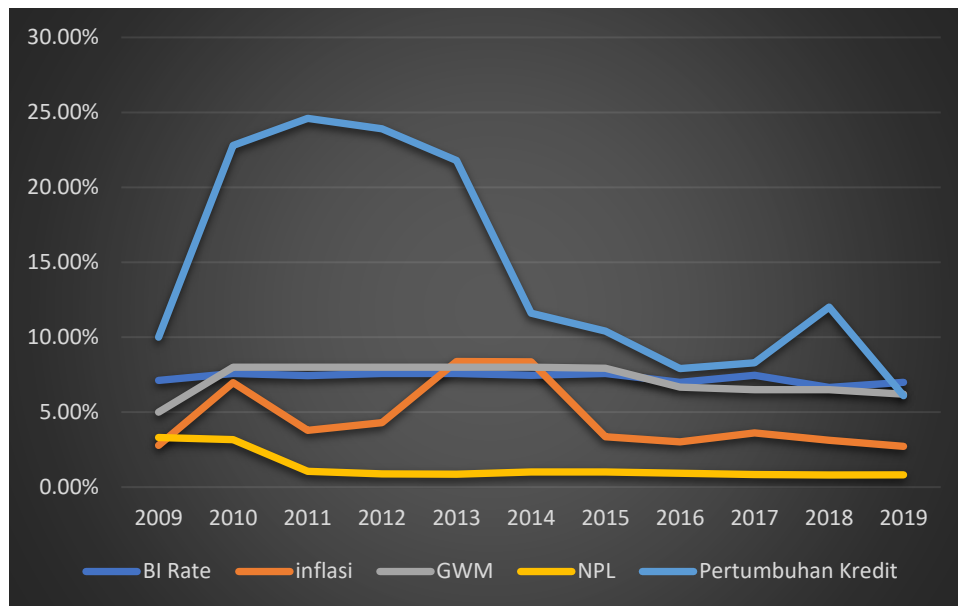
Tahun	BI Rate	Inflasi	GWM	NPL	Pertumbuhan Kredit	Pertumbuhan Ekonomi
2009	7,12%	2,78%	5,00%	3,31%	10,00%	4,5%
2010	7,58%	6,96%	8,00%	3,17%	22,80%	6,22%
2011	7,43%	3,79%	8,00%	1,48%	24,60%	6,17%
2012	7,58%	4,30%	8,00%	1,34%	23,90%	6,03%
2013	7,58%	8,38%	8,00%	1,26%	21,80%	5,56%
2014	7,45%	8,36%	8,00%	1,58%	11,60%	5,01%
2015	7,58%	3,35%	7,92%	1,79%	10,40%	4,88%
2016	7,00%	3,02%	6,67%	2,03%	7,90%	5,03%
2017	7,45%	3,61%	6,50%	1,64%	8,30%	5,07%
2018	6,65%	3,13%	6,50%	1,68%	12,00%	5,17%
2019	7,00%	2,72%	6,19%	1,79%	6,10%	5,02%

Sumber : www.ojk.go.id , www.bi.go.id, www.bps.go.id. data diolah 2021

Dari krisis *mortgage* yang terjadi di Amerika pada 2008, dan Eropa pada 2012, dapat dipelajari bahwa kredit merupakan salah satu penentu utama kondisi perekonomian. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Banu, 2013) dinyatakan bahwa salah satu penyebab utama krisis pada perekonomian modern adalah hilangnya sistem kredit yang efektif, dan mustahil sebuah perekonomian bisa berkembang tanpa aktivitas kredit.

(Otoritas Jasa Keuangan, 2015) menyatakan pada penelitiannya bahwa kredit seperti kredit modal kerja memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan kredit memiliki *flow* dan alur yang relatif sama dengan pertumbuhan kredit, fenomena tersebut dapat dilihat pada tahun 2011-2012 yang di mana perlambatan pada pertumbuhan kredit diikuti dengan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi, dan sama halnya juga selama kurang lebih 6 tahun berikutnya. Pada tahun 2013-2014 perlambatan pada pertumbuhan kredit, diikuti dengan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi, perlambatan kredit dan investasi yang ada di Indonesia dapat menjadi salah satu penyebab utama hal tersebut, dan hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014-2015. Fenomena yang terjadi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sipahutar, 2016), di mana di negara berkembang seperti Indonesia, terdapat hubungan yang positif antara kredit dengan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu bauran kebijakan yang mendorong pertumbuhan kredit yang efektif dan efisien merupakan salah satu upaya utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

GRAFIK 1. LAJU PERTUMBUHAN KREDIT, INFLASI, BI RATE, GIRO WAJIB MINIMUM DAN NON PERFORMING LOANS 2009-2019



Sumber : www.OJK.go.id , www.BI.go.id , data diolah 2021

Aktivitas kredit Indonesia memiliki nominal yang sangat besar, walaupun demikian dalam periode 2009-2019 target perbankan dan khususnya pertumbuhan kredit Indonesia seringkali tidak tercapai sehingga akan sangat berdampak pada kondisi stabilitas makroekonomi. Jika kita amati tabel 1.0 diatas sejak tahun 2012 pertumbuhan kredit mengalami perlambatan tiap tahunnya, pertumbuhan kredit melambat dan menyentuh angka dibawah 20% dari tahun 2013-2019 dan bahkan tidak dapat menyentuh pertumbuhan rata-rata yang *double digit* dari 2016-2019. Perlambatan yang terjadi dari 2014-2015 dapat disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang masih berusaha pulih dari krisis *subprime mortgage* di Amerika, bauran kebijakan moneter yang bersifat kontraktif juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perlambatan tersebut.

Dari tahun 2016-2019 penyaluran kredit Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan yang terparah yaitu pada angka 8,6%, secara umum kemunduran dalam pertumbuhan penyaluran kredit ini dikarenakan lesunya investasi yang masuk ke Indonesia, hal tersebut dapat disebabkan adanya *moral hazard* para investor pada negara yang dipicu oleh ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan juga regulasi, sehingga banyak arus modal

yang keluar. Tantangan eksternal dan internal *trade war* yang antara Amerika Serikat dengan Cina juga dapat memperlambat pertumbuhan permintaan kredit (*demand credits*) pada tahun 2016 keatas. Pertumbuhan penyaluran kredit yang terburuk terjadi pada tahun 2019 di angka 6% saja. Penyaluran kredit yang lesu dan cenderung memburuk akan sangat berdampak pada makro ekonomi negara, Friedman berpendapat bahwa kegagalan pemerintah dalam menyediakan *framework* kebijakan moneter yang stabil merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya krisis dan kegagalan makro ekonomi negara.

Agar kredit dapat berputar dengan efisien dan terkendali otoritas pengambil kebijakan dan pihak bank harus dapat memaksimalkan faktor-faktor dan instrumen moneter agar dapat mempengaruhi penyaluran kredit kearah yang dibutuhkan oleh kondisi perekonomian. Krisis moneter dan permasalahan makro yang pernah terjadi di dunia membuktikan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara pasar kredit dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam kebijakan moneter di Indonesia Inflasi mempunyai dampak terhadap individu maupun bagi kegiatan perekonomian luas.

Pada model Teori Kuantitas Uang dari sudut pandang Friedman, Inflasi adalah nilai tukar uang yang semakin rendah, atau harga barang – barang dan jasa semakin meningkat. inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menambah jumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh bank ataupun nasabah, oleh karena itu aktivitas penyaluran kredit akan sangat bergantung dengan pergerakan inflasi. (Czudaj, 2020) Pasca krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat, ekonomi dunia mengalami resesi hebat, akibatnya tingkat inflasi di banyak ekonomi moneter menurun secara substansial. Selama kurun waktu 10 tahun, yaitu 2009-2019 inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dan mencapai nilai terendah pada tahun 2009 dan 2019, pada tahun 2009 dengan angka 2,78%, hal tersebut dapat disebabkan karena Indonesia masih terdampak oleh krisis *mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 2019 inflasi Indonesia menyentuh titik terendah yaitu pada angka 2,72%, inflasi yang rendah tidak selalu menandakan perekonomian yang stabil, begitu pula sebaliknya dampak yang ditimbulkan dapat bersifat negatif ataupun positif.

Inflasi Indonesia yang fluktuasi dan tidak stabil akan berdampak pada pertumbuhan kredit. Friedman berpendapat bahwa kenaikan inflasi dapat langsung berpengaruh terhadap kenaikan suku bunga, lantas mengurangi minat masyarakat terhadap kredit,

tetapi jika kita amati pada tahun 2014-2015 di mana terjadi penurunan inflasi yang signifikan, pertumbuhan kredit malah mengalami penurunan, dan sama juga kasusnya pada tahun 2015-2016, 2019-2019 di mana pada tahun-tahun tersebut tidak ditemukan hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan kredit. pada penelitian yang dilakukan oleh (Megawati & Kesuma, 2014) yang menyatakan bahwa inflasi yang naik, akan meningkatkan permintaan kredit. jika kita amati pada tahun 2011-2012, di mana terjadi kenaikan inflasi yang besar, pertumbuhan kredit malah mengalami penurunan, dan sama kasusnya pada tahun 2012-2013 di mana kenaikan inflasi tidak diikuti dengan pertumbuhan penyaluran kredit. Inflasi yang stabil adalah pada angka 3-5%, (Tinoco Zermeno et al., 2018) menyatakan pada penelitiannya bahwa pada negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina) inflasi yang stabil 3-5% akan memperlancar perbankan dan mendorong perputaran kredit. Jika kita amati tabel dari tahun 2015-2019 inflasi yang berada di kisaran 3-5% dan cenderung stabil, tetapi dari sisi pertumbuhan kredit malah mengalami perlambatan yang terparah selama 10 tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh (Nanyonjo, 2018) menyatakan bahwa Kenaikan inflasi menunjukkan jumlah barang dan jasa yang di berikan negara akan meningkat, artinya kemampuan daya beli masyarakat menurun yang dari situ berakibat menjadi mahalnya barang produksi dan mempengaruhi neraca pembayaran dan mengurangi investasi dan kredit yang disalurkan.

Dari Keynes *quantity theory of money* para ekonom mengetahui bahwa inflasi dan tingkat suku bunga sangatlah erat kaitannya, dan jika ingin membahas dampak inflasi terhadap kredit, tidak akan bisa lepas dari membahas suku bunga juga. Berdasarkan (Houston, 2015) Inflasi merupakan salah satu penentu utama suku bunga pinjaman bank komersial secara global. Suku bunga acuan bank sentral Indonesia atau BI Rate merupakan salah satu instrumen moneter utama yang digunakan oleh bank sentral yang tidak hanya dapat berdampak pada sektor moneter, tetapi juga ke perekonomian secara keseluruhan.

Dari Tabel 1.0 dan Grafik 1.0 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat BI Rate di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi, walaupun begitu tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan perubahannya. Angka BI Rate terendah berada pada tahun 2018, pada angka 6,7%. Pergerakan BI Rate yang bersifat ekspansif seharusnya menjadi salah satu langkah untuk menstimulus sektor fiskal dengan pelonggaran

kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan kredit perbankan, seperti penelitian (Lugo, 2018) yang menyatakan bahwa pada negara berkembang kestabilan suku bunga sangat berpengaruh pada investasi dan pertumbuhan kredit, tetapi walaupun dengan pergerakan BI Rate yang cukup stabil dan fluktuatif yang tidak begitu signifikan, tetap saja pertumbuhan kredit Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. Fenomena juga dapat ditemukan pada tahun 2015-2016 yang di mana penurunan BI Rate tidak diikuti dengan peningkatan pada pertumbuhan kredit. Fenomena tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kostikov et al., 2019) dinyatakan pada penelitiannya bahwa penurunan Suku Bunga Acuan seharusnya diikuti dengan pertumbuhan penyaluran kredit.

Dalam situasi perekonomian yang sedang tersendat, kebijakan moneter ekspansif merupakan salah satu pilihan utama dalam mendorong kembali aktivitas tersebut. *Reserve Requirements* merupakan kebijakan yang sangatlah umum pada Bank Sentral dari seluruh penjuru dunia. (Gray, 2011) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa dari 121 bank sentral yang ada di dunia, hanya sembilan tidak menggunakan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM merupakan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan keadaan ekonomi yang ada.

(Bank Indonesia., 2018) GWM primer merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan diharapkan dapat mendorong perputaran kredit. Sebaliknya, jika dirasa perlu mengerem penyaluran kredit, GWM dapat dinaikkan atau mengurangi likuiditas bank. Kebijakan GWM ditujukan untuk mempengaruhi likuiditas sehingga dapat mempengaruhi suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank. Dari tahun 2009-2019 tidak banyak perubahan yang terjadi pada GWM, hal tersebut dapat disebabkan oleh para otoritas moneter yang memilih untuk mengambil kebijakan yang kontraktif. Setelah ditetapkan pada 16 Maret 2016 besaran GWM primer adalah 6,5% dari sebelumnya 7,5%, jika Indonesia ingin memacu pertumbuhan penyaluran kredit kebijakan GWM merupakan salah satu kebijakan yang harus di utilisasikan dengan efektif, (Vidyani, 2014) menyatakan bahwa bila rasio GWM ditingkatkan maka jumlah uang beredar akan berkurang. Disisi Lain kenaikan rasio GWM akan menyebabkan bank mengurangi pemberian kreditnya. Kondisi Giro Wajib Minimum yang cenderung stabil dan tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir seharusnya menandakan kondisi

pertumbuhan kredit yang stabil dan memenuhi target, (International Monetary Fund, 2016) menyatakan pada penelitiannya bahwa GWM adalah kebijakan yang digunakan disaat aktivitas kredit sedang stagnan dan cenderung menurun. Seharusnya selama 10 tahun terakhir yang di mana pertumbuhan kredit yang mengalami perlambatan terdapat lebih banyak modifikasi terhadap kebijakan Giro Wajib Minimum.

Non performing loan (NPL) juga merupakan faktor internal yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank mewakili kualitas aset bank. Masalah yang bersumber dari kredit bermasalah dapat membuat bank menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan kredit ke debitur. Dalam 10 tahun terakhir banyak penelitian yang mempelajari akan pengaruh dari sebuah NPL terhadap kondisi perbankan suatu negara. Pada tahun 2014 ada 32 negara yang memiliki NPL lebih dari 10% terhadap total kredit (World Bank), dan jika kita mengambil contoh negara yang pernah mengalami krisis yaitu Yunani, bahwa 34% dari total seluruh kreditnya merupakan NPL.

Berdasarkan tabel 1.0 dan grafik 1.0 data NPL Indonesia dari tahun 2009-2019, NPL Indonesia memiliki tren yang fluktuatif, di mana, NPL tertinggi terdapat pada tahun 2009 yaitu pada angka 3,31% pada tahun tersebut perbankan Indonesia masih terdampak oleh krisis *subprime mortgage* dari Amerika Serikat. Setelah tahun 2009 NPL Indonesia mengalami penurunan sampai dengan 2014 di mana pada tahun tersebut NPL berada pada angka 1,58%. Perlu diingat bahwa kenaikan pada NPL menandakan sebuah kemunduran pada sektor perbankan, walaupun berdasarkan (Bank Indonesia., 2013) disebutkan bahwa rasio NPL yang aman bagi bank ialah 5%, menurut penelitian yang dilakukan (Liang et al., 2018) NPL yang rendah akan mendorong perputaran dan pertumbuhan kredit. Tetapi peristiwa yang ada tidak sejalan dengan penelitiannya dikarenakan tren pertumbuhan kredit yang cenderung terus menurun dan dibawah target, menandakan bahwa NPL yang rendah juga merupakan *red flag* dari sistem perbankan negara, seperti yang dinyatakan oleh (Cucinelli, 2015) bahwa peningkatan pada rasio kredit macet (NPL) akan membuat bank lebih sukar dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, dikarenakan resiko kredit yang meningkat.

Dapat dilihat dari perkembangannya, variabel Inflasi, BI Rate, Giro Wajib Minimum, dan Non Performing Loans telah mengambil peranan yang penting dalam mewujudkan keadaan Pertumbuhan Kredit. Untuk variabel Inflasi, menurut penelitian

(Putra, 2018) menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit, namun terdapat perbedaan pada penelitian yang dikemukakan oleh (Tasik, 2016) menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit Indonesia, yang dapat diartikan bahwa peningkatan inflasi akan mengakibatkan penurunan pada pertumbuhan kredit. Dan untuk variabel BI Rate, menurut (Wenry et al., 2016) menunjukkan BI Rate berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan kredit. Tetapi dibantah oleh (Putra, 2018) bahwa BI Rate tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Kredit. Untuk variabel Giro Wajib Minimum menurut penelitian (Pradhana, 2016) hasil menunjukkan bahwa Giro Wajib Minimum berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Kredit, tetapi penelitian tersebut dibantah oleh (Fitri, 2017) yang dalam penelitiannya variabel Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Kredit. Dan untuk variabel *Non Performing Loans* menurut penelitian (Liang et al., 2018) membuktikan bahwa NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Kredit. Namun dibantah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdi et al., 2020) di mana pada penelitiannya dinyatakan bahwa NPL tidak memiliki signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah peneliti paparkan dan juga terdapat *research gap* antar peneliti, maka penulis tertarik untuk mengembangkan dan mengambil judul dalam penelitian yaitu “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Giro Wajib Minimum Dan *Non Performing Loans* Terhadap Pertumbuhan Kredit Bank Umum periode 2009-2019”.

I.2 Perumusan Masalah

Pertumbuhan kredit di Indonesia pada periode 2009-2019 memiliki tren yang bukan hanya tidak memenuhi target, tetapi juga cenderung terus menurun setiap tahunnya. Aktivitas penyaluran kredit yang tidak efektif dan efisien dapat sangat mempengaruhi keadaan makro secara keseluruhan. Perlambatan pada pertumbuhan kredit dapat disebabkan oleh beberapa hal, secara garis besar kebijakan yang kurang efektif dan bersifat kontraktif merupakan salah satu penyebab utama hal tersebut, seperti yang dijelaskan pada teori kebijakan moneter oleh Friedman (1968). Dari latar belakang dapat

kita interpretasikan bahwa kebijakan-kebijakan moneter yang ada belum dapat membuat laju pertumbuhan penyaluran kredit yang efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Bagaimana Pengaruh kebijakan Inflasi terhadap Pertumbuhan Kredit?
- b. Bagaimana Pengaruh kebijakan BI Rate terhadap Pertumbuhan Kredit?
- c. Bagaimana Pengaruh kebijakan Giro Wajib Minimum terhadap Pertumbuhan Kredit?
- d. Bagaimana Pengaruh *Non Performing Loans* terhadap Pertumbuhan Kredit?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Inflasi terhadap Pertumbuhan Kredit
- b. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan BI Rate terhadap Pertumbuhan Kredit
- c. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan Giro Wajib Minimum terhadap Pertumbuhan Kredit
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loans* terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pengembangan di bidang penelitian dan dapat menerapkann teori yang penulis dapatkan di dalam perkuliahan .
- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk melakukan pertimbangan penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Inflasi, BI Rate, Giro Wajib Minimum dan Non Performing Loans Pertumbuhan Kredit di Indonesia 2009-2019
- 3) Bagi peneliti dan pembaca dapat meningkatkan wawasan pengetahuan tentang berbagai sector atau variable yang diteliti yaitu Inflasi, BI Rate, Giro Wajib Minimum dan *Non Performing Loans*.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Otoritas Moneter

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi para otoritas pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan di dalam Sektor Moneter serta berbagai hal yang mempengaruhinya, khususnya Sektor Perbankan

2) Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan dalam membuat kebijakan untuk di dalam Sektor Moneter serta berbagai hal yang mempengaruhinya, khususnya Sektor Perbankan. Untuk mendeskripsikan pengaruh Inflasi, BI Rate, Giro Wajib Minimum dan *Non Performing Loans* terhadap Pertumbuhan Kredit Bank Umum Indonesia